

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skema *Millennium Development Goals (MDGs)* telah resmi berakhir dan dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Barika, Ekaputri, & Hermanto, 2023). Skema *SDGs* dideklarasikan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian *MDGs* sebelumnya agar berkelanjutan dan berjangka panjang (Ishartono & Raharjo, 2016). Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan penduduk dunia hampir setengahnya (Pertiwi, 2023; Nawir, Syamsuddin, & Jusniaty, 2022; Humanika, Trisusilo, & Setiawan, 2023).

Secara keseluruhan, skema *SDGs* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mempunyai 17 tujuan dan 169 target (Febriani & Samudra, 2023). Adapun tujuan utamanya adalah mengentaskan kemiskinan, mencapai kesetaraan, serta menangani perubahan iklim pada tahun 2030 (Barika, Ekaputri, & Hermanto, 2023). Tanpa kemiskinan (*no poverty*) dijadikan sebagai poin pertama prioritas dalam *SDGs* (Pratama, Purnomo, & Agustiyara, 2020; Barika, Ekaputri, & Hermanto, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dunia, termasuk Indonesia, sepakat untuk mengentaskan kemiskinan dalam bentuk apapun (Ishartono & Raharjo, 2016).

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan dan/atau keterbatasan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Indika & Marliza, 2019; Wulandari, et al., 2022; Wahab & Sudirman, 2023). Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, papan, akses

terhadap fasilitas kesehatan (Wulandari, et al., 2022; Wahab & Sudirman, 2023), pendidikan berkualitas, biaya sekolah, hingga investasi/tabungan masa depan (Wahab & Sudirman, 2023).

Berbagai daerah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan demografis, jumlah penduduk, kebijakan pemerintah daerah (Haywood & Boihang, 2021), akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender (Indika & Marliza, 2019), pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dana alokasi umum, kepadatan penduduk (Ardian & Destanto, 2021), angka partisipasi tingkat sekolah, persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan, tingkat partisipasi angkatan kerja, hingga distribusi persentase PDRB (Irfina & Wachidah, 2022). Masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, mengingat kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional.

Kemiskinan dapat menghambat kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah (Angga, Fasa, & Suharto, 2022; Triono & Sangaji, 2023). Kemiskinan dapat memunculkan berbagai masalah lain, seperti peningkatan angka pengangguran, inflasi, tingkat pendidikan putra dan putri daerah yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang melambat (Angga, Fasa, & Suharto, 2022), penurunan kualitas sumber daya manusia, produktivitas yang melemah (Triono & Sangaji, 2023), dan lain-lain. Dampak kemiskinan yang dirasakan setiap orang dalam suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya (Budianto, 2022).

Kemiskinan masih menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang terus-menerus muncul dan menjadi beban berat bagi Indonesia selaku negara

berkembang (Nawir, Syamsuddin, & Jusniaty, 2022). Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan kronis, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan juga membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, serta memerlukan suatu strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan, dan tidak bersifat temporer (Wahab & Sudirman, 2023).

Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial (UU RI No. 14 Tahun 2019). Pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meluncurkan berbagai program kemiskinan (Okuputra & Nasikh, 2022; BPS, 2023). Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan adalah melalui pemberdayaan di bidang kewirausahaan (Santoso, 2022; Swacahayawati, Nisa, Rahayu, Dewi, & Rois, 2022; Martiningtyas, Hermawan, Nuraini, Baliartati, & Lestari, 2022; Safrizal, et al., 2022).

Penanggulangan kemiskinan harus berjalan paralel dengan mengembalikan keberfungsian sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi (Yahya dalam Pemerintah Kota Surabaya, 2023). Konsep pemberdayaan tidak terlepas dari pemberian kekuasaan (Suharto, 2017) dan kekuatan/tenaga (Maryani & Nainggolan, 2019) pada kelompok rentan dan lemah (Habib, 2021; Suharto, 2017; Apriliandra, Suwandi, & Darwis, 2022). Pemberdayaan merupakan upaya membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta mengembangkan potensi itu demi menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kehidupan yang berdaya, mandiri,

partisipatif, dan berkelanjutan (Zubaedi dalam Nurhakim, Gunawan, & Wibowo, 2023; Kartasmita dalam Haryanto, Danial, & Hamdan, 2022; Ginting, Sembiring, Arlina, Dewi, & Kristian, 2022).

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung atau Poltekesos Bandung selaku perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Sosial RI turut melaksanakan fungsi dan layanan sosial sebagaimana Sentra dan Balai Sosial lainnya (Keputusan Menteri Sosial RI No. 221/HUK/2022). Poltekesos Bandung telah melaksanakan fungsi layanan sosial yang terdiri dari rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, manajemen kasus, sertifikasi, akreditasi, hingga Sentra Kreasi Atensi. Adapun program terbaru yang diselenggarakan oleh Poltekesos Bandung adalah Asistensi Rehabilitasi Sosial Kewirausahaan Warung Makan Indomie (Poltekesos Bandung, 2023).

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Kewirausahaan Warung Makan Indomie atau disingkat ATENSI Kewirausahaan Warmindo merupakan bentuk fungsi layanan rehabilitasi sosial yaitu Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Meskipun demikian, program ini terintegrasi dengan fungsi layanan pemberdayaan sosial. Program ini terdiri dari kegiatan pelatihan vokasional/pembinaan kewirausahaan dan bantuan/asistensi sosial. Keluarga penerima manfaat (KPM) program telah mendapatkan pelatihan keterampilan mengolah produk indomie, pembinaan usaha, aktivitas produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan gerobak usaha, bantuan alat dan bahan produksi, hingga pengembangan jejaring pemasaran (Poltekesos Bandung, 2023; Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2023).

Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo adalah program kerja sama antara Poltekesos Bandung dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Program ini diluncurkan pada saat yang bersamaan dengan wisuda Poltekesos Bandung pada hari Rabu, 20 September 2023 (Catur, 2023). Program ini merupakan bentuk perwujudan nyata integrasi antara Program ATENSI, pembelajaran di Poltekesos Bandung, dan pengelolaan usaha Warmindo bagi penerima manfaat. Program ini berbeda dengan program kewirausahaan pada umumnya karena melibatkan ilmu pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial dalam teori dan praktiknya, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja. Hingga kini, keluarga penerima manfaat (KPM) ATENSI Kewirausahaan Warmindo telah berjumlah 100 KPM dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Bandung : 20 KPM tersebar di Kecamatan Cibeunying Kaler, Lengkong, Cibeunying Kidul, Antapani, Batununggal, Andir, Sumur Bandung, Rancasari, Arcamanik, Coblong, Astana Anyar, Cidadap, Mandalajati, dan Bojongloa Kidul.
2. Kabupaten Bandung : 10 KPM tersebar di Kecamatan Cangkuang dan Soreang.
3. Kabupaten Bandung Barat : 10 KPM tersebar di Kecamatan Lembang, Batujajar, dan Cihampelas.
4. Kabupaten Sumedang : 20 KPM tersebar di Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Situraja, Cimalaka, Cisitua, Cisarua, Sumedang Selatan, Rancakalong, dan Paseh.

5. Kabupaten Garut : 40 KPM tersebar di Kecamatan Malangbong dan Samarang (Poltekesos Bandung, 2024).

Keluarga penerima manfaat (KPM) Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo di Kota Bandung telah menunjukkan perkembangan dalam pengelolaan usaha Warmindo. Hasil temuan awal pada saat peninjauan pra lapangan adalah terdapat KPM program yang telah mengelola usaha Warmindo dengan baik, di mana hal tersebut mendukung keberdayaan sosial bahkan ekonomi juga. KPM telah menunjukkan kesadaran terhadap potensi diri, keinginan memiliki taraf hidup yang lebih baik, kepercayaan diri dalam mengelola usaha, kemampuan mengakses pendapatan dan keuntungan, mengakses pasar, hingga kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam mengelola usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hal ini sejalan dengan teori keberdayaan menurut Suharto (2017).

Di samping itu, terdapat juga KPM yang belum mampu mengelola usaha Warmindo dengan baik. KPM tersebut masih sering mengalami kesulitan dalam menjual produk, produk tidak laku banyak, kesulitan mengelola keuangan, keterbatasan modal sehingga usaha rentan tidak berkelanjutan, hingga tidak ada tempat untuk berdagang sehingga harus menyewa. Berbagai hal tersebut menjadi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh KPM. Apabila tidak mendapat tindak lanjut, hal tersebut dapat menghambat perkembangan keberdayaan dan kesejahteraan KPM.

Dengan mempertimbangkan berbagai fenomena dan urgensi yang ada di Kota Bandung, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang

keberdayaan KPM Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo di kelima kota/kabupaten penyelenggaraan program. Hingga kini, tidak ada penelitian terdahulu yang bersifat ilmiah berkaitan dengan keberdayaan KPM Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo oleh Poltekesos Bandung. Meskipun demikian, peneliti meninjau dan memahami sejumlah penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi dengan penelitian ini. Peninjauan dan pemahaman terhadap penelitian terdahulu tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan pertimbangan yang dapat dijadikan acuan dasar dan perbandingan selama proses penelitian, sehingga memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian terdahulu oleh Hardiansyah, Nurwati, & Taftazani (2023) menunjukkan bahwa teori *ACTORS (Authority, Confidence & Competence, Trust, Opportunities, Responsibilities, Support)* oleh Cook & Macaulay (1997) dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu program efektif untuk meningkatkan keberdayaan kelompok sasaran dengan menggambarkan tentang adanya perbedaan tingkat keberdayaan sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Adapun penelitian terdahulu oleh Ningati, Indrianti, & Hilmi (2020) menunjukkan bahwa keberdayaan kelompok sasaran dapat diketahui dengan menggambarkan pengaruh antara metode pelatihan dan keberdayaan, serta pengaruh antara media pelatihan dan keberdayaan.

Di samping itu, penelitian terdahulu oleh Pratiwi, Nurmayasari, Siliviyanti, & Nikmatullah (2023), Roni, Damsid, & Jabar (2022), Mansyur (2021), dan Firmansyah (2012) menunjukkan bahwa teori keberdayaan oleh Suharto (2008; 2010) dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi keberdayaan kelompok

sasaran dan menganalisis ketercapaian tujuan suatu program pemberdayaan. Aspek keberdayaan yang disebutkan dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah kesadaran untuk berubah (*power to*), kemampuan untuk memperoleh akses (*power within*), kemampuan untuk mengatasi hambatan (*power over*), dan kemampuan untuk bekerja sama (*power with*). Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut menyebutkan kesadaran untuk berubah sebagai *power to* dan kemampuan untuk memperoleh akses sebagai *power within*. Hal ini bertentangan dengan teori asli yang dikemukakan Suharto (2017) dalam Cetakan VI buku *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Meskipun demikian, terdapat 1 penelitian terdahulu oleh Loany & Murdianto (2021) menunjukkan bahwa teori keberdayaan oleh Suharto (2005) dapat menggambarkan tingkat keberdayaan masyarakat penerima manfaat program CSR.

Keberdayaan penerima manfaat suatu program yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, serta kemampuan kultural dan politis dapat dijadikan alat ukur keberhasilan suatu program pemberdayaan (Suharto, 2017; Mardikanto & Soebiato, 2017; Pratiwi, Nurmayasari, Siliviyanti, & Nikmatullah, 2023; Roni, Damsid, & Jabar, 2022; Mansyur, 2021; Loany & Murdianto, 2021; Firmansyah, 2012). Ketiga aspek kemampuan tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu:

1. *Power within* / kekuasaan di dalam meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah.

2. *Power to* / kekuasaan untuk meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses.
3. *Power over* / kekuasaan atas perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro; kekuatan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.
4. *Power with* / kekuasaan dengan meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro (Suharto, 2017).

Penelitian ini berjudul “Keberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Kewirausahaan Warung Makan Indomie oleh Poltekesos Bandung”. Dalam penelitian ini, teori keberdayaan oleh Suharto (2017) diadaptasi secara lebih teknis dan dihubungkan dengan tujuan penelitian ini. Untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai keberdayaan KPM Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo oleh Poltekesos Bandung secara objektif dan representatif, maka peneliti mengadopsi 4 indikator keberdayaan menurut teori Suharto (2017) tersebut sebagai aspek dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini akan melibatkan ilmu pekerjaan sosial dan peran pekerja sosial dalam proses dan tindak lanjut hasil penelitian sebagai dalam bentuk usulan program. Hal ini akan menjadi pembeda bagi penelitian terdahulu, baik yang menggunakan atau tidak menggunakan teori keberdayaan oleh Suharto (2017).

Aspek kesadaran untuk berubah (*power within*) pada KPM Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo merujuk pada pemahaman dan keyakinan bahwa KPM memiliki kemampuan dan kekuatan internal untuk melakukan

perubahan yang positif dalam hidup melalui pengelolaan usaha Warmindo. Adapun parameter dalam aspek tersebut berupa kepemilikan rencana masa depan, keinginan memiliki penghasilan tetap, kegigihan mengelola usaha, kesadaran menabung untuk masa depan, keinginan berdaya saing, dan lain-lain.

Aspek kemampuan untuk memperoleh akses (*power to*) pada KPM Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo merujuk pada kemampuan KPM untuk mendapatkan akses secara efektif dan efisien terhadap sumber daya, informasi, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan keberdayaan melalui pengelolaan usaha Warmindo. Adapun parameter dalam aspek tersebut berupa pengurusan izin usaha dagang, pengajuan pinjaman modal, dukungan dari masyarakat, pendampingan usaha, dan lain-lain.

Aspek kemampuan untuk mengatasi hambatan (*power over*) pada KPM Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo merujuk pada kemampuan KPM dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai rintangan/hambatan yang muncul dalam meningkatkan keberdayaan melalui pengelolaan usaha Warmindo. Hambatan tersebut dapat berupa ketidakpastian, ketakutan untuk gagal, persaingan pasar yang ketat, dan lain-lain. Adapun parameter dalam aspek tersebut berupa penyisihan sebagian keuntungan, pembuatan rencana anggaran dan buku keuangan, penerimaan kritik dan saran, perawatan dan pemeliharaan peralatan usaha, dan lain-lain.

Aspek kemampuan untuk bekerja sama (*power with*) pada KPM Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo merujuk pada kemampuan KPM untuk bekerja sama secara kolaboratif dengan orang lain (partisipasi), saling

mendukung, dan menginspirasi melalui pengelolaan usaha Warmindo. Adapun parameter dalam aspek tersebut berupa pertukaran informasi antar pelaku usaha, pemasaran produk usaha satu sama lain, penerimaan titipan dagangan orang lain, pembagian tugas dalam mengelola usaha, dan lain-lain.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah utama yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana keberdayaan keluarga penerima manfaat Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Kewirausahaan Warung Makan Indomie oleh Poltekesos Bandung?”. Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah utama tersebut, maka rumusan masalah utama diuraikan ke dalam sub-sub rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana kesadaran untuk berubah (*power within*) pada keluarga penerima manfaat Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo?
3. Bagaimana kemampuan untuk memperoleh akses (*power to*) pada keluarga penerima manfaat Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo?
4. Bagaimana kemampuan untuk mengatasi hambatan (*power over*) pada keluarga penerima manfaat Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo?
5. Bagaimana kemampuan untuk bekerja sama (*power with*) pada keluarga penerima manfaat Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan utama penelitian adalah untuk mendeskripsikan keberdayaan keluarga penerima manfaat

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Kewirausahaan Warung Makan Indomie oleh Poltekesos Bandung. Adapun sub-sub tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi yang faktual dan representatif mengenai:

1. Karakteristik responden.
2. Kesadaran untuk berubah (*power within*) pada keluarga penerima manfaat Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo.
3. Kemampuan untuk memperoleh akses (*power to*) pada keluarga penerima manfaat Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo.
4. Kemampuan untuk mengatasi hambatan (*power over*) pada keluarga penerima manfaat Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo.
5. Kemampuan untuk bekerja sama (*power with*) pada keluarga penerima manfaat Program ATENSI Kewirausahaan Warmindo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai teori keberdayaan keluarga penerima manfaat Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Kewirausahaan Warung Makan Indomie. Penelitian ini juga diharapkan akan menjadi referensi penting bagi penelitian ilmu pekerjaan sosial di masa yang akan datang, terkhusus dalam profil lulusan Analisis Pemberdayaan Sosial pada Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gambaran dan pemikiran yang komprehensif bagi para praktisi mengenai praktik pemberdayaan keluarga miskin melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Kewirausahaan Warung Makan Indomie. Penelitian ini juga diharapkan akan memberikan rekomendasi/saran dan pertimbangan yang membangun bagi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan Kementerian Sosial RI dalam perkembangan praktik pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memuat 6 bab yang disusun secara sistematis dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : PENDAHULUAN, yakni memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : KAJIAN KONSEPTUAL, yakni memuat tentang penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran.
- BAB III** : METODE PENELITIAN, yakni memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV** : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yakni memuat tentang deskripsi umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan berupa analisis masalah, kebutuhan, dan sistem sumber.

BAB V : USULAN PROGRAM, yakni memuat tentang usulan program pemecahan masalah yang terdiri dari dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN, yakni memuat tentang simpulan dan saran tentang temuan yang perlu ditindaklanjuti.